

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. Meskipun masih menjadi negara berkembang, Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto atau pendapatan output perkapita.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara, di antaranya Kebijakan Pemerintah, Sumber Daya Manusia, Teknologi, Modal, Investasi, dan Lembaga Keuangan. Lembaga keuangan memiliki peran strategis dalam menghubungkan dan memfasilitasi faktor-faktor pertumbuhan ekonomi ini, seperti memobilisasi dan mengalokasikan modal, membangun sistem keuangan yang efisien dan inklusif, serta membantu mendorong terwujudnya investasi dan inovasi. Salah satu sektor yang menjadi penilaian keberhasilan pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah sektor keuangan. Perbankan syariah merupakan salah satu sektor keuangan yang ada di Indonesia.

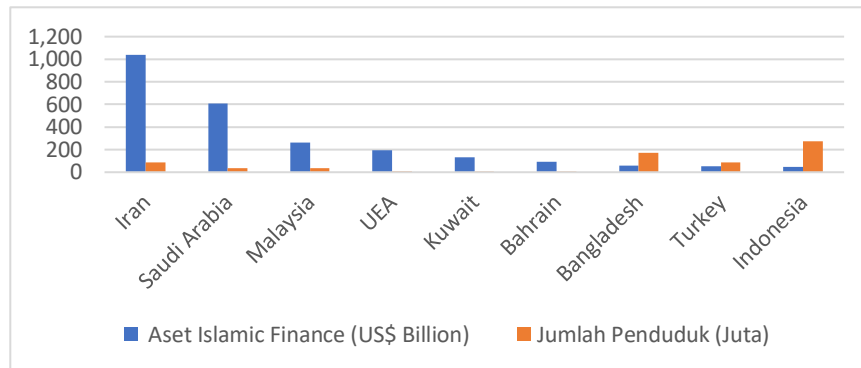
Selama kurang lebih dua dekade, perbankan syariah terus mengalami pertumbuhan yang positif khususnya pada aspek total aset, dana pihak ketiga

(DPK), dan pembiayaan. Data Bank Dunia menunjukkan bahwa ada 97,74 juta orang dewasa di Indonesia yang masuk kategori unbanked. Jumlah itu setara dengan 48% dari populasi dewasa di dalam negeri.

Jumlah penduduk unbanked di Indonesia merupakan yang terbesar keempat di dunia. Sedangkan di Asia Tenggara, berdasarkan riset Google, Temasek, Bain dan Company tahun 2022, terdapat 81% penduduk Indonesia yang belum terlayani jasa keuangan (*unbanked*). Pada tahun 2022 jumlah penduduk dewasa di Indonesia yang belum tersentuh lembaga keuangan formal yaitu 81% angkanya paling tinggi dibandingkan beberapa negara dikawasan Asia Tenggara lainnya seperti Filipina (75%), Vietnam (54%), Thailand (46%), Malaysia (28%), dan Singapura (12%). Kondisi inilah yang membuat masih banyak penduduk Indonesia yang hidup dalam kondisi miskin.

Menurut *Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD)* yang dilihat dari data total aset *Islamic Finance*, Indonesia menduduki peringkat ke-9 dengan total aset sebesar 48 triliun, sedangkan posisi pertama diduduki oleh Iran dengan jumlah aset sebesar 1,039 triliun, posisi ke-2 Saudi Arabia sebesar 606 triliun, posisi ke-3 Malaysia sebesar 262 triliun, posisi ke-4 UAE sebesar 192 triliun, kemudian posisi ke-5 Kuwait sebesar 134 triliun, posisi ke-6 Bahrain 92 triliun, posisi ke-7 Bangladesh 56 triliun dan posisi ke-8 Turki 55 triliun.

Grafik 1.1
Aset Islamic Finance dan Jumlah Penduduk



Sumber : ICD – Refinitiv Islamic Finance Development Report 2022

Dari data diatas dapat dilihat Indonesia masih tertinggal jauh jika dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya, padahal Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar. Jumlah penduduk yang besar pun tidak selalu memiliki perkembangan yang besar pula. Seperti Indonesia walaupun jumlah penduduknya sangat tinggi dan mayoritas penduduknya beragama islam tetapi jumlah aset *Islamic Finance* masih berada di urutan ke-9. Berbeda dengan Iran yang jumlah penduduknya relatif kecil tetapi memiliki jumlah aset *Islamic Finance* yang terbesar bahkan diatas Saudi Arabia.

Inklusi keuangan adalah upaya untuk memastikan bahwa semua individu dan bisnis memiliki akses yang mudah dan terjangkau ke layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini termasuk berbagai layanan seperti perbankan, asuransi, investasi, dan lainnya. Inklusi keuangan dapat ditemukan di berbagai tempat, diantaranya perbankan konvensional, perbankan syariah, lembaga keuangan mikro, layanan keuangan digital, koperasi keuangan, asuransi dan lain-lain. Tetapi dalam penelitian ini hanya terfokus pada inklusi keuangan yang terdapat di perbankan syariah yang ada di Indonesia saja.

Dalam beberapa tahun terakhir, perbankan Syariah memang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Namun, Perkembangan perbankan syariah dan perbankan konvensional di Indonesia memang masih memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari data yang diolah oleh OJK bahwa jumlah DPK, jumlah kantor cabang, dan jumlah pembiayaan perbankan konvensional masih lebih tinggi dibandingkan dengan perbankan Syariah di Indonesia.

Tabel 1.1
Perbandingan Jumlah DPK Perbankan Syariah dan Jumlah DPK Perbankan Konvensional

Tahun	Jumlah DPK (Milyar)		
	Perbankan Syariah	Perbankan Konvensional	Presentase
2018	256.441	5.630.448	4,55%
2019	287.852	5.998.648	4,80%
2020	321.573	6.665.390	4,82%
2021	364.302	6.442.601	5,65%
2022	605.737	6.907.838	8,77%

Sumber: data statistik perbankan syariah dan statistik keuangan (<https://ojk.go.id>)

Dari data di atas menunjukkan bahwa dari tahun 2018-2022 pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang dilihat dari jumlah DPK perbankan syariah masih tertinggal jauh jika dibandingkan dengan perbankan konvensional.

Tabel 1.2
Perbandingan Jumlah Kantor Perbankan Syariah dan Jumlah Kantor Perbankan Konvensional

Tahun	Jumlah Kantor		
	Perbankan Syariah	Perbankan Konvensional	Presentase
2018	1.874	31.609	5,93%
2019	1.918	31.127	6,16%
2020	2.033	30.733	6,62%
2021	2.034	32.366	6,28%
2022	2.006	25.377	7,90%

Sumber: data statistik perbankan syariah dan statistik keuangan (<https://ojk.go.id>)

Dari data di atas menunjukkan bahwa dari tahun 2018-2022 pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang dilihat dari jumlah kantor perbankan syariah juga masih tertinggal jauh jika dibandingkan dengan perbankan konvensional.

Tabel 1.3
Perbandingan Jumlah Pembiayaan Perbankan Syariah dan Jumlah Pembiayaan Perbankan Konvensional

Tahun	Jumlah Pembiayaan (Milyar)		Presentase
	Perbankan Syariah	Perbankan Konvensional	
2018	201.622	5.358.012	3,76%
2019	224.450	5.683.757	3,95%
2020	245.726	5.547.618	4,43%
2021	255.587	5.820.636	4,39%
2022	321.964	6.497.620	4,96%

Sumber: data statistik perbankan syariah dan statistik keuangan
(<https://ojk.go.id>)

Sama halnya dengan jumlah DPK dan jumlah kantor, jumlah pembiayaan di perbankan syariah juga masih tertinggal dengan jumlah pembiayaan di perbankan konvensional. Dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2018-2022 pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang dilihat dari jumlah DPK, jumlah kantor cabang, dan jumlah pembiayaan masih tertinggal jauh jika dibandingkan dengan perbankan konvensional. Saat ini, masyarakat Indonesia cenderung lebih mengenal dan telah menggunakan jasa perbankan konvensional daripada perbankan syariah. Hal ini dapat terjadi karena perbankan konvensional sudah lebih lama beroperasi dan memiliki jumlah cabang yang lebih banyak, sehingga lebih mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, masih ada persepsi bahwa perbankan konvensional lebih familiar dan mudah digunakan, sedangkan perbankan syariah masih dianggap kurang familiar atau kompleks.

Bank Syariah memegang peran yang sangat penting dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, hal ini dapat dilakukan dengan menumbuhkan sektor investasi melalui dana pihak ketiga dan menumbuhkan pembiayaan melalui pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat. Berkembangnya keuangan syariah juga akan memberikan kontribusi positif dalam memperkuat perekonomian negara. Adanya potensi yang besar bagi perbankan syariah dikarenakan mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam serta prinsip kerjasama dan bagi hasil yang ada dalam perbankan syariah, menjadi sebuah tantangan bagi perbankan syariah untuk dapat meningkatkan inklusi keuangan syariah sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomis yang kedepannya akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Keuangan inklusif mampu meningkatkan efisiensi ekonomi, mendukung stabilitas sistem keuangan, mengurangi *shadow banking* atau *irresponsible finance*, mendukung pendalaman pasar keuangan, memberikan potensi pasar baru bagi perbankan, mendukung peningkatan *Human Development Index* (HDI) Indonesia, berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional yang berkelanjutan dan mengurangi kesenjangan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya berujung pada penurunan tingkat kemiskinan.

Menurut Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan bahwa pada tahun 2019-2022 Indeks Inklusi Keuangan Syariah masih lebih rendah dibandingkan dengan Indeks Inklusi Keuangan Konvensional, pada tahun 2022 tingkat inklusi keuangan konvensional mencapai angka 85,10% sedangkan inklusi keuangan syariah hanya mencapai angka 12,12%, artinya masih banyak masyarakat Indonesia

yang lebih memilih untuk mengakses lembaga keuangan Konvensional dibandingkan dengan Lembaga Keuangan Syariah. Banyak faktor yang menjadi alasan mengapa masyarakat lebih memilih dan percaya terhadap lembaga keuangan konvensional diantaranya, keterbatasan pengetahuan, keuntungan finansial, ketersediaan layanan, persepsi risiko.

Dalam mengukur inklusi keuangan menurut Sarma, ada tiga dimensi pengukuran yang biasanya digunakan secara internasional yaitu dimensi *accessibility*, dimensi *availability*, dan dimensi *usage*. Dimensi pertama yang digunakan dalam mengukur inklusi keuangan adalah dimensi akses merupakan tingkat penetrasi perbankan yang menyatakan perlunya sistem inklusi keuangan untuk menjangkau sebanyak mungkin pengguna jasa layanan perbankan. Salah satu indikator dimensi akses adalah kepemilikan rekening bank. Semakin besar penetrasi perbankan pada semua kalangan masyarakat maka akan mendorong penambahan kepemilikan rekening bank baru. (Sarma, 2008). Teori *Finance-Growth Nexus* atau Teori Hubungan Keuangan-Pertumbuhan berpendapat bahwa inklusi keuangan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. (Levine, 2005) Salah satu konsep penting dalam teori ini adalah aksesibilitas keuangan atau "*financial access*" yang menandakan bahwa akses yang mudah ke produk dan layanan keuangan dapat meningkatkan efisiensi dalam alokasi modal dan investasi, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. (Levine, 2005).

Penelitian Sarma dan Ribaj dan Mexhuani membuktikan bahwa dimensi akses yang diwakili oleh indikator kepemilikan rekening bank baru berdampak

positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kepemilikan rekening bank baru akan diikuti dengan kenaikan tingkat tabungan, yang berarti kemampuan perbankan dalam menyalurkan kredit untuk investasi pada sektor produksi akan meningkat. Peningkatan Investasi akan berdampak pada peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. (Ribaj & Mexhuani, 2021). Namun demikian penelitian Ratnawati menunjukkan hasil yang berbeda, dimana dimensi akses melalui jumlah rekening tabungan perbankan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi negara berkembang di Asia dikarenakan indikator tersebut tidak secara langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. (Ratnawati, 2020)

Menurut Sarma dimensi kedua yang digunakan untuk mengukur inklusi keuangan adalah dimensi ketersediaan atau *Availabilitas* berarti inklusi keuangan harus tersedia secara merata sehingga mudah diakses oleh penggunanya, dimensi ini dapat diukur menggunakan jumlah cabang bank atau jumlah ATM (*Automatics Teller Machine*) yang tersedia untuk memberikan layanan jasa keuangan. (Sarma, 2008). *Availabilitas* dalam inklusi keuangan juga memiliki korelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dapat disimpulkan bahwa ketersediaan institusi keuangan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan akses ke modal, risiko diversifikasi, investasi, dan efisiensi. (Levine, 2005). Teori Dual Trigger menyatakan bahwa dalam memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, penting untuk memperhatikan dua aspek utama, yaitu pengembangan akses fisik berupa infrastruktur keuangan dan pemberdayaan masyarakat untuk menggunakannya. (Ross Levine dan Sara Zervos, 1998). Pengembangan akses fisik dapat meningkatkan *availabilitas* layanan keuangan, sementara pemberdayaan

masyarakat dapat meningkatkan penggunaan layanan keuangan tersebut. Kombinasi dari kedua aspek ini dapat memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi. (Ross Levine dan Sara, 1998).

Jumlah kantor cabang bank dan jumlah ATM berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan di ASEAN. Semakin banyak ketersediaan kantor perbankan/jasa keuangan ataupun ATM dalam suatu daerah, maka semakin mudah dan cepat masyarakat daerah tersebut dalam penggunaan jasa pelayanan keuangan. Selanjutnya, terciptanya inklusi keuangan melalui dimensi ketersediaan mendorong dan mempercepat perputaran uang, sehingga mempengaruhi tingkat konsumsi pengguna jasa layanan keuangan yang pada akhirnya berkontribusi positif terhadap PDB. (Ferdinand et al., 2022). Namun, pada penelitian lain menunjukkan tidak adanya hubungan antara inklusi keuangan dimensi ketersediaan melalui indikator atm bank terhadap pertumbuhan ekonomi di India. (Iqbal & Sami, 2017).

Dimensi ketiga yang digunakan untuk mengukur inklusi keuangan menurut Sarma adalah penggunaan, dimensi ini dimotivasi oleh persoalan *underbanked* atau *marginally banked*. Penggunaan lebih menekankan pada penggunaan rekening atau akun lembaga keuangan secara bertanggung jawab dan berkesinambungan. Menurut penelitian Sethi dan Achary beberapa negara menunjukkan adanya jumlah kepemilikan rekening bank yang tinggi namun masih belum optimal dalam menggunakan jasa layanan keuangan yang ditawarkan oleh bank, sehingga perlu dilihat dari sisi penggunaannya melalui jumlah pinjaman yang

disalurkan oleh bank. Jumlah pinjaman yang disalurkan bank umum berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. (Sethi & Acharya, 2018).

Selanjutnya menurut Dean Karlan dan Jonathan Morduch (2010) penggunaan dalam inklusi keuangan memiliki korelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi. Mereka menyimpulkan bahwa tingkat penggunaan produk dan layanan keuangan yang lebih tinggi dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui kemampuan untuk menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi, meningkatkan keamanan keuangan, dan memperingan kemiskinan. Namun, jika masyarakat tidak mampu mengelola produk keuangan dengan baik, maka inklusi keuangan dapat menjadi beban dan memperburuk ketimpangan ekonomi. Namun demikian penelitian lain memberikan hasil yang berbeda dimana penggunaan inklusi keuangan dengan indikator pinjaman yang disalurkan bank umum berpengaruh secara negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. (Febriaty et al., 2020).

Beberapa ahli telah mengemukakan teori aksesibilitas, availabilitas, dan penggunaan terhadap pertumbuhan ekonomi, teori bahwa inklusi keuangan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan aksesibilitas layanan keuangan dan pemberdayaan individu dan bisnis untuk melakukan investasi yang lebih produktif.(Cull et al., 2009). Sedangkan menurut ahli selanjutnya penelitian mereka menunjukkan bahwa availabilitas dan aksesibilitas layanan keuangan yang lebih baik dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Mereka menekankan pentingnya pengaturan keuangan dan mekanisme kebijakan yang mendukung inklusi keuangan.(Demirgüç-Kunt & Klapper, 2013)

Salah satu indikator yang sangat penting dalam menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi dalam suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi. Pada dasarnya, pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi mempunyai makna yang berbeda. Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh sistem kelembagaan. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Dari suatu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan oleh penambahan faktor-faktor produksi baik dalam jumlah dan kualitasnya. Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output, yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah. (Rahardjo, 2013). PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

Hasil Penelitian Sarma menunjukkan banyak negara yang memiliki nilai indeks inklusi keuangan yang tinggi adalah negara-negara berpendapatan tinggi. (Sarma, 2008). Karena itu inklusi keuangan dan tingkat pendapatan cenderung bergerak ke

arah yang sama, walaupun terdapat beberapa pengecualian. (Kim, Yu, & Hassan, 2018). Lenka & Sharma juga menemukan inklusi keuangan memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan memiliki hubungan yang searah. (Lenka, S.K., & Sharma, 2017). Inklusi Keuangan dapat menaikkan Pertumbuhan Ekonomi lewat penyaluran pembiayaan untuk masyarakat, terutama yang memiliki bisnis/usaha, dimana jika bisnis/usaha tersebut berkembang dan produktivitasnya meningkat, kemudian dapat meningkatkan output agregat suatu negara. (Dabla-Norris et al., 2015). Inklusi Keuangan untuk individu maupun badan usaha, dipandang sebagai cara untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat lewat pemenuhan akses dan penggunaan jasa keuangan formal, yang dalam jangka panjang dapat mengurangi kemiskinan dan dapat memajukan perkembangan ekonomi. (Sahay et al., 2018).

Ribaj dan Mexhuani membuktikan bahwa dimensi akses yang diwakili oleh indikator kepemilikan rekening bank baru berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kepemilikan rekening bank baru akan diikuti dengan kenaikan tingkat tabungan, yang berarti kemampuan perbankan dalam menyalurkan kredit untuk investasi pada sektor produksi akan meningkat. Peningkatan Investasi akan berdampak pada peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. (Ribaj & Mexhuani, 2021). Namun demikian penelitian Ratnawati menunjukkan hasil yang berbeda, dimana dimensi akses melalui jumlah rekening tabungan perbankan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi negara berkembang di Asia dikarenakan indikator tersebut tidak secara langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. (Ratnawati, 2020).

Laporan Statistik perbankan syariah serta Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia yang dijadikan objek penelitian untuk melihat pengaruh inklusi keuangan syariah pada perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang diambil secara tahunan pada periode 2018-2022. Data rata-rata yang digunakan untuk mengukur Inklusi Keuangan Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi 33 Provinsi di Indonesia dapat dilihat pada tabel 1.4.

Tabel 1.4
Aksesibilitas, Availabilitas, Penggunaan Pada Perbankan Syariah dan
Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Periode 2018-2020

Tahun	Aksesibilitas	Availabilitas	Penggunaan	Pertumbuhan Ekonomi
2018	0,87	0,75	17,83	4,10
2019	0,98	0,76	19,12	3,79
2020	1,12	0,83	23,42	-2,50
2021	1,26	0,83	24,93	2,80
2022	2,04	0,86	29,31	4,36

Sumber: Data empiris yang diolah dari laporan statistik tahunan perbankan syariah dan Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

Berdasarkan tabel di atas pada laporan statistik tahunan perbankan syariah dan Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto periode 2018-2020 yang sudah diolah oleh peneliti. Dapat dilihat bahwa Aksesibilitas, Availabilitas, Penggunaan dan Pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan ataupun penurunan hal ini sering kita kenal dengan sebutan fluktuasi. Pada tahun 2019 dan 2020, adanya ketidaksesuaian yang sesuai dengan teori, yang berlaku dimana seharusnya ketika semua dimensi naik yaitu Aksesibilitas, Availabilitas, dan Penggunaan naik maka Pertumbuhan ekonomi naik, namun yang terjadi pada tahun 2019 dan 2020 berbeda dimana seharusnya pertumbuhan ekonomi naik, pada tahun tersebut menjadi turun dikarenakan pandemi covid-19.

Berdasarkan uraian diatas penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang melatar belakangi penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, jumlah penduduk Indonesia yang masuk kategori unbanked atau tidak memiliki rekening. Pada tahun 2022 jumlah penduduk yang belum tersentuh layanan jasa keuangan formal yaitu 81%, angkanya paling tinggi dibandingkan dengan negara kawasan Asia Tenggara lainnya. Kedua, jumlah aset *Islamic Finance* Indonesia yang masih tertinggal dibandingkan dengan negara Islam lainnya padahal mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Ketiga, perkembangan perbankan syariah dan perbankan konvensional di Indonesia masih memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Keempat, indeks inklusi keuangan syariah masih lebih rendah dibandingkan dengan indeks inklusi keuangan konvensional. Terakhir, adanya ketidaksesuaian dengan teori yang berlaku dimana seharusnya ketika semua dimensi naik yaitu Aksesibilitas, Availabilitas, dan Penggunaan naik maka Pertumbuhan ekonomi naik, namun yang terjadi pada tahun 2019 dan 2020 berbeda dimana seharusnya pertumbuhan ekonomi naik, pada tahun tersebut mengalami penurunan.

Maka dengan adanya masalah-masalah tersebut, penulis tertarik mengambil judul penelitian “Pengaruh Inklusi Keuangan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia periode 2018-2022”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Aksesibilitas pada perbankan syariah, secara parsial berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Periode 2018-2022?
2. Apakah Availabilitas pada perbankan syariah, secara parsial berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Periode 2018-2022?
3. Apakah Penggunaan pada perbankan syariah, secara parsial berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Periode 2018-2022?
4. Apakah Aksesibilitas, Availabilitas dan Penggunaan pada perbankan syariah, secara simultan berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia periode 2018-2022?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Pemaparan Rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Aksesibilitas pada perbankan syariah, secara parsial Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Periode 2018-2022.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui Availabilitas pada perbankan syariah, secara parsial Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Periode 2018-2022.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Penggunaan pada perbankan syariah, secara parsial Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Periode 2018-2022.

4. Untuk menganalisis dan mengetahui Pengaruh Aksesibilitas, Availabilitas dan Penggunaan pada perbankan syariah, secara simultan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia periode 2018-2022.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah manfaat serta kegunaan baik secara teoritis maupun praktis dengan kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1) Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini dapat memberikan inovasi dan ide bagi lingkup Manajemen Keuangan Syariah maupun pada bidang yang serupa, serta menjadi referensi yang sesuai bagi penelitian berikutnya. Serta dapat memberikan dampak teruntuk mahasiswa/i jurusan Manajemen Keuangan Syariah kepada seluruh tingkatan sehingga menjadi acuan dan masukan bagi penelitian selanjutnya.
2. Sesuai dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan wawasan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai perbankan syariah dan inklusi keuangan syariah beserta operasinya.

2) Kegunaan Praktis

Hasil penelitian juga diharapkan memberikan kegunaan praktis sebagai berikut:

1. Bagi Otoritas Jasa Keuangan

Manfaat penelitian ini bagi regulator (pengawas) seperti Otoritas Jasa keuangan (OJK) adalah dapat memberikan masukan dalam pengambilan keputusan

terkait kebijakan keuangan inklusif dan meningkatkan kualitas sistem pengawasan keuangan syariah.

2. Bagi Manajer Perbankan Syariah

Manfaat penelitian ini bagi perbankan syariah seperti manajer bank dan pihak lain yang terkait adalah dapat membantu bank syariah untuk mengembangkan produk dan layanan keuangan syariah.

3. Bagi Akademisi

Manfaat penelitian ini bagi akademisi seperti mahasiswa adalah dapat menjadi referensi dan dapat memberikan wawasan serta pengetahuan baru mengenai inklusi keuangan syariah di Indonesia dan pengaruhnya terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

4. Bagi Masyarakat

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat atau nasabah adalah masyarakat akan semakin paham bagaimana dunia finansial bekerja, sehingga literasi finansialnya pun juga meningkat.